



Policy

KEBIJAKAN UNTUK ASOSIASI

FSC-POL-01-004 V3-0



Judul:	Kebijakan untuk Asosiasi
Tanggal:	Tanggal persetujuan: 26 Agustus 2022
Hubungi untuk komentar:	FSC Global Development – Dispute Management Adenauerallee 134 53113 Bonn Germany Telepon: +49 -(0)228 -36766 -0 Fax: +49 -(0)228 -36766 -65 Email: dispute.resolution@fsc.org

Riwayat versi

Tanggal publikasi: 4 Oktober 2022

Tanggal efektif: 1 Januari 2023

Versi	Deskripsi	Tanggal
V1-0	Dewan Direksi FSC menyetujui elemen penting dari <i>Kebijakan untuk Asosiasi FSC</i> pada bulan Juli 2009 – enam kegiatan yang tidak dapat diterima, yaitu organisasi yang ingin <i>berasosiasi*</i> dengan FSC tidak dapat terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung (lihat Bagian I) – tetapi dengan menyadari bahwa pekerjaan lebih lanjut akan diperlukan untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan secara lebih rinci.	02/07/2009
V2-0	Dewan Direksi FSC menyetujui rincian implementasi kebijakan (lihat Bagian II) pada bulan September 2011.	01/09/2011
V3-0	Versi ini memperkenalkan definisi <i>kontrol*</i> dan <i>kelompok perusahaan*</i> untuk mendefinisikan ulang ruang lingkup aplikasi serta persyaratan pengungkapan untuk penyaringan berbasis risiko. Versi ini menyelaraskan kebijakan dengan interpretasi yang sudah ada mengenai penelitian dalam rekayasa genetika dan pemikiran terbaru dalam posisi FSC tentang konversi.	01/01/2023

© 2022 Forest Stewardship Council A.C. Semua hak cipta dilindungi oleh undang-undang FSC® F000100

Anda tidak boleh mendistribusikan, memodifikasi, mengirimkan, menggunakan kembali, mereproduksi, memposting ulang, atau menggunakan materi berhak cipta dari dokumen ini untuk tujuan publik atau komersial, tanpa persetujuan tertulis dari penayang. Anda dengan ini berwenang untuk melihat, mengunduh, mencetak, dan mendistribusikan masing-masing halaman dari subjek dokumen ini hanya untuk tujuan informasi.

Daftar Isi

Pendahuluan	4
Tujuan	4
Lingkup	5
Referensi	5
Bagian I: Elemen kebijakan	6
Bagian II: Implementasi kebijakan	6
Lampiran 1: Kelompok perusahaan	8
Lampiran 2: Keterlibatan dalam kegiatan yang tidak dapat diterima	9
Lampiran 3: Istilah dan definisi	10

Pendahuluan

Hutan menopang kehidupan di bumi dan harus dilindungi. Itulah alasan keberadaan FSC: untuk memberikan solusi pengelolaan hutan lestari yang dipercaya oleh LSM, konsumen, dan bisnis untuk melindungi hutan yang sehat dan tangguh, untuk semua, selamanya. Kami menyatukan para ahli dari bidang lingkungan, ekonomi dan sosial untuk mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang bertanggung jawab. *Kebijakan untuk Asosiasi* adalah pernyataan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh individu dan organisasi *terkait** dengan FSC. Hal ini mendefinisikan enam kegiatan yang tidak dapat diterima, dimana individu dan organisasi serta *kelompok perusahaan** *terkait** berkomitmen untuk menghindari kegiatan tersebut dalam operasi bersertifikat dan non-bersertifikat.

Kebijakan untuk Asosiasi berfungsi sebagai alat manajemen risiko untuk FSC, melindungi kredibilitas dan reputasi merek dan organisasi FSC yang *terkait** dengannya. Ini berlaku untuk seluruh *kelompok perusahaan** meskipun hanya terbatas kepada kelompok yang memiliki hubungan aktif dengan FSC. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan nilai-nilai inti FSC ke organisasi-organisasi di *kelompok perusahaan** yang tidak sendiri aktif dalam sistem sertifikasi. Lingkup kebijakan ini adalah sarana untuk menghindari kesalahpahaman atau penggunaan nama FSC dalam kaitannya dengan kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip inti FSC dan yang dapat membahayakan kemampuan FSC untuk menjalankan misinya. Kebijakan ini juga memungkinkan untuk memerlukan perbaikan dan pemulihan serta pemutusan semua ikatan kontrak dengan individu atau organisasi yang ditemukan melanggar kebijakan.

Implementasi kebijakan

Untuk melindungi reputasi FSC dan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak dapat diterima, FSC akan menilai beberapa pilihan, dari mediasi hingga investigasi, sanksi dan penetapan kondisi, untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi *terkait** dengan FSC. Tindakan dan konsekuensinya tergantung pada beratnya pelanggaran. Pemangku kepentingan harus terlibat dalam semua upaya yang wajar untuk mengatasi masalah sebelum mengajukan *Kebijakan untuk Asosiasi* keluhan.

*Tuduhan** pelanggaran *Kebijakan untuk Asosiasi* terhadap individu dan organisasi *terkait** akan diterima dan dievaluasi oleh FSC setelah menyajikan informasi penting* bahwa individu atau organisasi atau *kelompok perusahaan** terkaitnya telah melanggar kebijakan.

Untuk mengimplementasikan *Kebijakan untuk Asosiasi*, digunakan dua dokumen prosedural:

- 1) Perorangan atau organisasi yang ingin bergabung dengan FSC harus menjalani proses penyaringan dan mengungkapkan informasi, sesuai dengan FSC-PRO-10-004 *Persyaratan Pengungkapan untuk Asosiasi dengan FSC*.
- 2) Jika potensi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut menjadi perhatian FSC, maka *Proses Kebijakan untuk Pengaduan Asosiasi FSC* FSC-PRO-01-009 akan diterapkan.

Tujuan

Tujuan dari *Kebijakan Asosiasi* adalah untuk menguraikan dan mendefinisikan kegiatan yang tidak dapat diterima yang berdampak parah pada hutan dan masyarakat di lapangan dan yang menimbulkan risiko reputasi jika *berasosiasi** dengan FSC. Kebijakan tersebut mendefinisikan konsekuensi dari terlibat di dalamnya bagi organisasi dan individu yang sedang atau berusaha untuk *berasosiasi** dengan FSC. Kebijakan tersebut menentukan organisasi dan individu mana yang dapat atau tidak dapat *berasosiasi** dengan FSC.

Lingkup

Kebijakan Asosiasi berlaku untuk semua individu, organisasi, dan *kelompok perusahaan** *terkaitnya** dan bagi mereka yang mencari *asosiasi** dengan FSC.

Kebijakan tersebut menyatakan enam aktivitas yang tidak dapat diterima (lihat Bagian I: Elemen kebijakan) dimana individu, organisasi dan *kelompok perusahaan** dan *terkaitnya** harus berkomitmen untuk menghindari aktivitas tersebut dan menentukan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan ini (lihat Bagian II: Implementasi kebijakan).

Kebijakan ini berlaku untuk situasi ketika aktivitas yang tidak dapat diterima sedang atau telah terjadi. Niat untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima bukanlah alasan yang cukup untuk memicu penyelidikan atau pengaduan. Namun, niat untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima dapat memicu tindakan proaktif lainnya oleh FSC, termasuk pengumpulan informasi dan pemantauan, untuk membantu memastikan bahwa aktivitas yang tidak dapat diterima tidak terjadi di waktu mendatang.

Dalam semangat sistem FSC, perselisihan harus selalu ditangani pada tingkat serendah mungkin, dan para pemangku kepentingan didorong untuk mengikuti prinsip ini. Pengaduan terkait pelanggaran *Kebijakan untuk Asosiasi* yang tumpang tindih dengan kesesuaian organisasi dan persyaratan sertifikasinya harus terlebih dahulu ditangani oleh lembaga sertifikasi masing-masing melalui prosedur pengaduan yang ditetapkan.

Jangka waktu sejauh mana pelanggaran dianggap relevan ditangani berdasarkan kasus per kasus, kecuali ditentukan dalam kebijakan ini, dengan menggunakan kondisi seperti, namun tidak terbatas pada: i) apakah masih ada kerugian; ii) skala dan dampak kerugian yang ditimbulkan; iii) tingkat tindakan yang telah diambil untuk memperbaiki kerugian masa lalu; iv) apakah ada perubahan sistemik yang dapat dibuktikan untuk mencegah terulangnya kembali aktivitas yang tidak dapat diterima.

Kebijakan versi 3-0 ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kebijakan versi 2-0 sebelumnya tetap berlaku untuk pelanggaran yang terjadi sebelum tanggal berlakunya versi 3-0.

Referensi

Referensi berikut ini sangat penting untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan yang tidak bertanggung, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan (termasuk setiap amendemennya).

<i>FSC-PRO-01-009</i>	<i>Proses Kebijakan untuk Pengaduan Asosiasi FSC</i>
<i>FSC-PRO-10-004</i>	<i>Persyaratan Pengungkapan untuk Asosiasi dengan FSC</i>
<i>FSC-PRO-01-004</i>	<i>Kerangka Kerja Perbaikan FSC</i>
<i>FSC-STD-01-002</i>	<i>Daftar Istilah FSC</i>
	<i>Statuta FSC</i>

Bagian I: Elemen kebijakan

1. FSC bertujuan untuk *berasosiasi** dengan individu dan organisasi yang selaras dengan misi dan nilai-nilai FSC serta tidak akan *berasosiasi** jika individu, organisasi, atau *kelompok perusahaannya** sedang atau telah terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima berikut ini:
 - a) *Penebangan liar atau perdagangan ilegal* dari hasil hutan**
 - b) Pelanggaran *adat** atau *hak asasi manusia** dalam kehutanan atau *sektor hasil hutan**
 - c) Pelanggaran *hak* dan prinsip *pekerja** didefinisikan dalam Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja di dalam kehutanan atau *sektor hasil hutan**
 - d) *Perusakan Nilai Konservasi Tinggi* (NKT) di hutan atau pada kawasan Nilai Konservasi Tinggi**
 - e) Konversi dari tutupan hutan alam*
 - f) Penggunaan *rekayasa genetika** organisme di pelaksanaan kehutanan untuk tujuan selain penelitian¹.

CATATAN: Lihat Lampiran 1 untuk kriteria yang mendefinisikan *kelompok perusahaan** dan Lampiran 2 untuk pertimbangan lebih lanjut tentang keadaan ketika individu atau organisasi *terkait** telah terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima.

Bagian II: Implementasi kebijakan

2. Uji kelayakan dan pengungkapan

- 2.1. Seorang individu atau organisasi *terkait** harus memastikan bahwa mereka dan *kelompok perusahaan** memiliki kebijakan dan prosedur untuk menghindari keterlibatan apa pun dalam aktivitas relevan yang tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Bagian I. Keberadaan kebijakan tersebut tidak diverifikasi oleh FSC sebelum *asosiasi**. Dalam kasus keluhan, kurang memadainya *uji kelayakan** serta untuk menghindari risiko pelanggaran terhadap *Kebijakan untuk Asosiasi* akan dipertimbangkan.
- 2.2. FSC hanya akan mengadakan, atau mempertahankan, sebuah *asosiasi** dengan individu atau organisasi yang sesuai dengan persyaratan pengungkapan *Persyaratan Pengungkapan untuk Asosiasi dengan FSC* FSC-PRO-10-004.

3. Mengevaluasi tuduhan

- 3.1. Setiap pemangku kepentingan dapat mengajukan keluhan jika ada *informasi penting** dimana individu atau organisasi *terkait** atau *kelompok perusahaannya** diduga melanggar kebijakan ini. Keluhan diproses sesuai dengan *Proses Kebijakan untuk Pengaduan Asosiasi FSC* FSC-PRO-01-009.

4. Konsekuensi dari pelanggaran kebijakan ini

- 4.1. Seorang individu atau organisasi *terkait** yang terbukti melanggar kebijakan ini, bersama dengan *kelompok perusahaannya**, akan menghadapi salah satu dari dua konsekuensi, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam FSC-PRO-01-009:

¹ Penelitian, sebagaimana didefinisikan oleh INT-POL-01-004-01, dipahami sebagai kegiatan-kegiatan yang a) memiliki tujuan investigasi yang jelas (seperti, menguji hipotesis), b) dilakukan dalam skala terbatas dan dengan jadwal yang ditentukan yang kompatibel dengan ruang lingkup penelitian, dan c) dilakukan dengan mengikuti semua persyaratan hukum terkait, termasuk perlindungan, dan izin.

- a. Mempertahankan *asosiasi** dengan kondisi terikat waktu yang harus dipenuhi untuk tetap *terabung** dengan FSC. Individu atau organisasi *terkait** harus setuju untuk memenuhi persyaratan ini. Kegagalan untuk mengimplementasikannya dalam batas waktu yang disepakati akan menjadi alasan untuk *disasosiasi**.
- b. *Disasosiasi** dari FSC, dengan prasyarat utama yang harus dipenuhi sebelum mempertimbangkan proses untuk mengakhiri *disasosiasi**.

CATATAN: Lihat FSC-PRO-01-009 *Proses Kebijakan untuk Pengaduan Asosiasi FSC* untuk daftar faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan konsekuensi pelanggaran, serta jenis kondisi yang harus dipenuhi untuk mempertahankan *asosiasi** atau mengakhiri *disasosiasi**. Lihat juga Statuta FSC (Peraturan dasar FSC) untuk proses penghentian anggota.

- 4.2. Organisasi atau individu yang mengajukan permohonan untuk *asosiasi** yang terbukti melanggar kebijakan ini, tidak akan diberikan *asosiasi** dengan FSC.

5 Mengakhiri disasosiasi dan mengajukan permohonan asosiasi setelah pelanggaran yang dikonfirmasi

- 5.1 Individu atau organisasi yang *tidak terkait** atau yang ditolak dan tertarik untuk *bergabung** dengan FSC akan memasuki proses perbaikan.
- 5.2 Persyaratan khusus bagi individu atau organisasi harus dikembangkan oleh pihak ketiga yang independen berdasarkan persyaratan umum yang ditentukan dalam *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* FSC-PRO-01-004. Persyaratan tersebut merupakan rencana bagaimana cara perbaikan, dan pencegahan terulangnya pelanggaran yang teridentifikasi sebelumnya. Mereka juga dapat mempertimbangkan aktivitas yang tidak termasuk dalam keluhan awal jika memungkinkan telah melanggar *Kebijakan untuk Asosiasi* dan dianggap perlu untuk dimasukkan untuk alasan membangun kepercayaan. Lihat *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* dan FSC-PRO-01-009 *Memproses Kebijakan untuk Pengaduan Asosiasi FSC* untuk informasi lebih lanjut tentang prosesnya.
- 5.3 Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan FSC mengakhiri *disasosiasi**, individu atau organisasi tersebut dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan FSC sebagai anggota dan/atau pemegang perjanjian lisensi FSC.

Lampiran 1: Kelompok perusahaan

Kebijakan untuk Asosiasi berlaku untuk individu dan organisasi dan *kelompok perusahaan** terkait* milik mereka.

Tabel 1: Definisi dan faktor yang digunakan untuk menentukan *kelompok perusahaan²**

Definisi dari <i>kelompok perusahaan*</i> :	Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan merupakan bagian dari <i>kelompok perusahaan*</i> yang lebih luas meliputi:
<p>Totalitas badan hukum yang organisasi <i>asosiasi*</i> berafiliasi dalam hubungan perusahaan dengan salah satu pihak yang <i>mengontrol*</i> kinerja pihak lain (misalnya perusahaan induk atau saudara, anak perusahaan, usaha patungan, dll.).</p> <p><i>Kontrol*</i> dalam hal ini berarti memiliki kekuasaan untuk mengarahkan, membatasi, mengatur, memerintah, atau mengurus kinerja perusahaan lain melalui wewenang, hak, kontrak, atau cara lain.</p> <p>CATATAN: <i>Kontrol*</i> dapat berarti terlepas dari persentase kepemilikan; namun, itu dianggap ada (kecuali bukti menunjukkan sebaliknya) ketika sebuah organisasi atau individu memiliki lebih dari 50 persen saham di badan hukum lain.</p>	<p>Formalitas hubungan: Apakah ada kepemilikan formal, seperti melalui struktur investasi kepemilikan?</p> <p>Dideklarasikan sebagai kelompok: Apakah kelompok telah mengumumkan secara terbuka bahwa perusahaan-perusahaan tersebut terhubung?</p> <p>Kontrol keluarga: Apakah perusahaan dimiliki atau dijalankan dan dikontrol oleh anggota keluarga yang sama?</p> <p>Kontrol keuangan: Apakah ada kontrak atau pengaturan keuangan lainnya yang mengindikasikan satu pihak <i>mengontrol*</i> kinerja pihak lain?</p> <p>Kontrol manajemen: Apakah ada tumpang tindih yang luas dalam pejabat di antara perusahaan?</p> <p>Kontrol operasional: Apakah kepemilikan tanah di bawah <i>kontrol*</i> operasional kelompok?</p> <p>Kepemilikan manfaat: Apakah kepemilikan akhir disembunyikan di perusahaan lepas pantai atau dengan menggunakan pencalonan?</p> <p>Sumber daya bersama: Apakah perusahaan berbagi alamat terdaftar, tanah atau aset fisik lainnya, atau penyediaan fungsi atau layanan perusahaan?</p>

CATATAN: Definisi dan faktor yang digunakan untuk menentukan *kelompok perusahaan** dan *kontrol**, akan diterapkan dan dievaluasi berdasarkan kasus per kasus.

Contoh manajerial *kontrol** dalam *kelompok perusahaan**

Perusahaan A memiliki beberapa sertifikat FSC, dan Perusahaan B tidak memiliki sertifikat FSC. Pemilik Perusahaan A duduk di dewan Perusahaan B dengan hak suara 20%. Pemilik Perusahaan A menetapkan tolak ukur kinerja untuk manajemen Perusahaan B. Jika Perusahaan B diketahui terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima, maka penyelidikan akan dilakukan untuk menentukan apakah Perusahaan A memiliki manajemen *kontrol** atas tindakan Perusahaan B dan apakah tindakan tersebut akan dianggap sebagai bagian dari tindakan *kelompok perusahaan** yang sama. Jika ya, aktivitas Perusahaan B yang tidak dapat diterima merupakan pelanggaran terhadap *Kebijakan untuk Asosiasi*.

² Definisi dan faktor yang diadaptasi dari definisi "Kelompok Perusahaan" oleh Accountability Framework Initiative (2022)

Lampiran 2: Keterlibatan dalam kegiatan yang tidak dapat diterima

Seorang individu atau organisasi *terkait** dan *kelompok perusahaan** nya dianggap melanggar *Kebijakan untuk Asosiasi* jika mereka sedang atau telah terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima yang telah ditentukan dalam klausul 1 elemen Kebijakan. Mereka dianggap terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima jika mereka memiliki *kontrol** atas aktivitas tersebut. Aktivitas yang tidak dapat diterima dapat dilakukan oleh mereka sendiri, atau oleh organisasi lain yang mereka *kontrol**.

Dengan demikian, individu atau organisasi dan *kelompok perusahaan** dapat dinyatakan telah melanggar *Kebijakan untuk Asosiasi* melalui hubungan komersial. Hal ini ditentukan oleh adanya *kontrol** terhadap aktivitas yang tidak dapat diterima. Misalnya, aktivitas pemasok yang terlarang dan tidak dapat diterima merupakan pelanggaran terhadap *Kebijakan Asosiasi* hanya jika individu atau organisasi *terkait** dan *kelompok perusahaan** yang memiliki *kontrol** atas indakan pemasoknya.

Contoh *kontrol** dalam hubungan komersial

Perusahaan A memiliki sertifikat rantai pengawasan FSC dan membeli kayu dari Perusahaan B yang tidak bersertifikat FSC. Perusahaan B adalah pemasok untuk Perusahaan A, dan keduanya merupakan entitas perusahaan yang terpisah. Perusahaan A, bagaimanapun, adalah satu-satunya pembeli produk Perusahaan B dan kontrak penjualan antara perusahaan memberikan hak kepada Perusahaan A untuk memveto rencana pengelolaan Perusahaan B. Jika Perusahaan B diketahui terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima, maka evaluasi *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* akan dipicu untuk menentukan apakah Perusahaan A memiliki kontrol* atas indakan Perusahaan B. Jika ya, kegiatan tindakan yang tidak dapat diterima dari kegiatan Perusahaan B merupakan pelanggaran terhadap *Kebijakan untuk Asosiasi FSC*.

Lampiran 3: Istilah dan definisi

Untuk keperluan dokumen internasional ini, istilah dan definisi yang diberikan dalam FSC-STD-01-002 *Daftar Istilah FSC* berlaku seperti berikut ini:

Tuduhan: Pernyataan keyakinan bahwa beberapa kesalahan atau kerugian telah terjadi

Asosiasi (terkait, asosiasi, organisasi terkait): Asosiasi dengan FSC secara resmi didirikan melalui salah satu hubungan kontrak berikut: perjanjian keanggotaan FSC; perjanjian lisensi pemegang sertifikat FSC; perjanjian lisensi lembaga sertifikasi FSC; perjanjian kemitraan FSC.

Kontrol: Kepemilikan kekuasaan untuk mengarahkan, membatasi, mengatur, menentukan, atau mengurus kinerja perusahaan lain melalui wewenang, hak, kontrak, atau cara lain.

Konversi tutupan hutan alami: *Perubahan tutupan hutan alam** yang abadi* yang disebabkan oleh aktivitas manusia*. Ini mencakup *degradasi** hutan secara bertahap serta transformasi hutan yang cepat.

- **Terinduksi oleh aktivitas manusia:** Aktivitas ini berbeda dengan perubahan drastis yang disebabkan oleh bencana alam seperti angin topan atau letusan gunung berapi. Hal ini juga berlaku dalam kasus kebakaran yang dipicu secara alami karena aktivitas manusia (misalnya pengeringan lahan gambut) yang mengakibatkan meningkatnya risiko kebakaran secara signifikan.
- **Perubahan abadi tutupan hutan alam*:** Perubahan tutupan permanen atau jangka panjang dari tutupan *hutan alam**. Perubahan sementara tutupan atau struktur hutan (misalnya pemanenan diikuti oleh regenerasi sesuai dengan kerangka normatif FSC) tidak dianggap sebagai *konversi tutupan hutan alami**.

CATATAN: Untuk tujuan kebijakan ini, pembentukan infrastruktur tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab (misalnya jalan hutan, jalan sarad, tempat penimbunan kayu, proteksi kebakaran, dll.) tidak dianggap sebagai konversi.

CATATAN: Ketentuan untuk konversi minimal berlaku juga dalam konteks asosiasi*.

Kelompok perusahaan: Totalitas badan hukum organisasi *terkait** yang berafiliasi dalam hubungan perusahaan dimanalah satu pihak *mengontrol** kinerja pihak lain (misalnya perusahaan induk atau saudara, anak perusahaan, usaha patungan, dll.). Lihat juga Lampiran 1.

Hak adat: Hak-hak yang dihasilkan dari serangkaian tindakan kebiasaan atau adat yang panjang, dan terus-menerus diulang, sertadengan persetujuan yang tidak terputus, memperoleh kekuatan hukum dalam unit geografis atau sosiologis. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).

Degradasi: Perubahan dalam *hutan alam** atau area *Nilai Konservasi Tinggi** yang secara signifikan dan negatif mempengaruhi komposisi spesies, struktur dan/atau fungsinya, dan mengurangi kapasitas ekosistem untuk memasok produk, mendukung keanekaragaman hayati dan/atau memberikan jasa ekosistem.

Pengrusakan Nilai Konservasi Tinggi: Perubahan permanen dari *Nilai Konservasi Tinggi**. Hal ini dapat dicirikan oleh hilangnya *keanekaragaman spesies** secara signifikan, keanekaragaman habitat, kompleksitas struktural, fungsi ekosistem, mata pencaharian dan nilai-nilai budaya. Perubahan sementara yang tidak berdampak negatif dan permanen terhadap nilai ini (misalnya pemanenannya yang diikuti oleh regenerasi sesuai dengan Prinsip 9) tidak dianggap sebagai perubahan yang bertahan lama.

Catatan penjelasan:

Untuk tujuan kebijakan ini, tidak diharapkan *bahwa** individu atau organisasi terkait atau *kelompok perusahaannya** secara sistematis melakukan penilaian *NKT** untuk menentukan keberadaan *NKT** dan

ancamannya. Sebaliknya, mereka diharapkan menggunakan alat yang tersedia dan memiliki strategi mitigasi untuk situasi ketika ada potensi risiko terhadap NKT*. Untuk alat, lihat misalnya *Platform Penilaian Risiko FSC*, *Panduan NKT untuk Pengelola Hutan* (FSC-GUI-30-009) dan *Panduan FSC untuk Implementasi Hak atas Persetujuan Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi* (FPIC) (FSC-GUI-30-003).

Disosiasi (Dipisahkan): Pengakhiran semua hubungan kontrak yang ada (anggota dan lisensi) antara FSC dan individu, organisasi dan *kelompok perusahaan* terkait**. Pemisahan juga mencegah masuknya hubungan kontrak baru dengan FSC.

Uji kelayakan: Proses manajemen risiko yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan cara organisasi itu menangani risiko dan dampak lingkungan dan sosial dalam operasi, rantai pasokan, dan investasinya.

Hasil hutan: Bahan dan produk organik berbasis hutan yang dihasilkan dalam matriks hutan, termasuk hasil hutan kayu dan non-kayu. (Sumber: Diadaptasi dari definisi hutan berdasarkan *FSC-STD-40-004 V3-1*.)

Sektor hasil hutan: Mencakup semua entitas yang memperdagangkan atau memproduksi produk dari bahan organik berbasis hutan, termasuk *hasil hutan** kayu dan non-kayu. (Sumber: Diadaptasi dari definisi hutan berdasarkan *FSC-STD-40-004 V3-1*)

Hasil rekayasa genetika (organisme): Organisme yang materi genetiknya telah diubah dengan cara yang tidak terjadi secara alami melalui perkawinan dan/atau rekombinasi alami. Kebijakan ini khusus untuk organisme yang berupa pohon. (Berdasarkan *FSC-POL-30-602*). (Sumber: *FSC-STD-01-001 V5-2*).

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi: Zona dan ruang fisik yang memiliki dan/atau diperlukan untuk keberadaan dan pemeliharaan yang teridentifikasi *Nilai Konservasi Tinggi**. (Sumber: *FSC-STD-60-004 V2-0*).

Nilai Konservasi Tinggi (NKT): Seperti yang didefinisikan dalam *Prinsip dan Kriteria untuk Penatagunaan Hutan FSC*, *FSC-STD-01-001 V5-2*, termasuk keanekaragaman spesies NKT1, ekosistem dan mosaik tingkat lanskap NKT 2, ekosistem dan habitat NKT 3, jasa ekosistem kritis NKT4, kebutuhan masyarakat NKT5, dan nilai budaya NKT6.

Hak asasi Manusia: Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan martabat kemanusiaannya dan merupakan jumlah hak individu dan kolektif yang ditetapkan dalam konstitusi negara dan hukum internasional. Hak asasi manusia itu bermacam-macam. Hak asasi manusia termasuk, minimal, hak-hak yang dinyatakan dalam Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia (terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen utama yang telah disusun: Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia, hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat No. 169 dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar yang ditetapkan dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Bergantung pada situasinya, organisasi mungkin perlu mempertimbangkan standar dan instrumen tambahan.

Pemanenan ilegal dan/atau perdagangan ilegal hasil hutan: Pemanenan kayu dan non-kayu *hasil hutan** yang melanggar setiap dan semua undang-undang yang berlaku di lokasi tersebut atau yurisdiksi termasuk, namun tidak terbatas pada, undang-undang yang terkait dengan perolehan hak pemanenan dari pemilik yang sah, metode pemanenan yang digunakan, dan pembayaran semua biaya dan royalti yang relevan. Istilah 'perdagangan ilegal' mengacu pada 'perdagangan ilegal' hasil hutan' dan 'perdagangan legal secara ilegal dari hasil hutan' dan termasuk, misalnya, penipuan, penyuapan, dan pembelian atau penjualan kembali kayu yang ditebang secara ilegal'. (Sumber: Diadaptasi dari *FSC FSC-STD-40-005 V3-1*).

Hutan alam: Kawasan hutan dengan banyak karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur dan keanekaragaman hayati, termasuk karakteristik tanah, flora, dan fauna, yang semua atau hampir semua pohonnya merupakan spesies asli, tidak diklasifikasikan sebagai perkebunan.

Hutan alam termasuk dalam kategori berikut:

- Hutan yang dipengaruhi oleh pemanenan atau gangguan lainnya, dimana pohon sedang atau telah diregenerasi oleh kombinasi regenerasi alami dan atau buatan dengan spesies khas hutan alam di lokasi tersebut, dan yang masih ada banyak karakteristik di atas tanah dan di bawah tanah dari hutan alam. Di hutan boreal dan hutan beriklim utara yang secara alami terdiri dari hanya satu atau beberapa spesies pohon, kombinasi regenerasi alami dan buatan untuk meregenerasi hutan dari spesies asli yang sama, dengan sebagian besar karakteristik utama dan elemen utama dari ekosistem asli situs tersebut, tidak dengan sendirinya dianggap sebagai *konversi** menjadi perkebunan.
- Hutan alam yang dipelihara dengan praktik silvikultur tradisional termasuk regenerasi alami atau terbantu.
- Hutan sekunder atau hutan kolonisasi yang berkembang dengan baik dari spesies asli yang telah beregenerasi di kawasan non-hutan.
- Definisi hutan alam dapat mencakup kawasan yang digambarkan sebagai ekosistem berhutan, hutan, dan sabana.

Hutan alam tidak termasuk lahan yang tidak didominasi oleh pepohonan, sebelumnya bukan hutan, dan belum mengandung banyak karakteristik dan elemen ekosistem asli. Regenerasi muda dapat dianggap sebagai hutan alam setelah beberapa tahun mengalami perkembangan ekologis.

Hilangnya keanekaragaman spesies secara signifikan: Hilangnya spesies dianggap signifikan jika spesies langka dan spesies terancam atau spesies penting lainnya, utama dan/atau unggulan lokal telah hilang, baik dalam hal jumlah individu atau dalam hal jumlah spesies. Hal ini mengacu pada perpindahan dan kepunahan.

Informasi penting: Informasi yang dapat dipercaya yang diberikan oleh pihak ketiga dan/atau dikumpulkan melalui penelitian independen yang diperoleh dari sumber terpercaya/terkenal merupakan bukti kuat untuk dipertimbangkan dalam penyelidikan. Informasi penting ini dapat mencakup salah satu bentuk berikut ini selama bukti yang ada memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam definisi: laporan ilmiah, analisis teknis, laporan sertifikasi, artikel berita yang dikuatkan, laporan resmi dan/atau pengumuman oleh otoritas pemerintah, analisis hukum, Informasi Geografis Informasi sistem (koordinat batas, pemetaan perubahan satelit), video atau rekaman, gambar, wawancara independen, pernyataan tertulis dan deklarasi, notulen rapat, dan informasi perusahaan/organisasi.

Hak pekerja: Hak-hak yang didefinisikan dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja dan Konvensi Inti ILO. Prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja mencakup kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama; penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; penghapusan pekerja anak yang efektif; dan penghapusan diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan. Hak-hak dasar ini dan implementasinya telah diperiksa lebih lanjut, misalnya dalam Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial dan untuk tujuan verifikasi dalam Persyaratan Ketenagakerjaan Inti FSC.

Bentuk verbal untuk pernyataan ketentuan

[Diadaptasi dari Arahan ISO/IEC Bagian 2: Aturan untuk struktur dan penyusunan Standar Internasional]

"harus": menunjukkan persyaratan yang harus diikuti secara ketat agar sesuai dengan dokumen.

"seharusnya": menunjukkan bahwa di antara beberapa kemungkinan terdapat satu yang direkomendasikan sebagai sangat cocok, tanpa menyebutkan atau mengecualikan yang lain, atau bahwa tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak selalu diperlukan.

"mungkin": menunjukkan tindakan yang diizinkan dalam batas-batas dokumen.

"bisa": digunakan untuk pernyataan kemungkinan dan kemampuan, baik material, fisik, atau kausal.



FSC Global Development – Dispute Management

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Germany

Telepon: +49 -(0)228 -36766 -0

Fax: +49 -(0)228 -36766 -65

Email: dispute.resolution@fsc.org